

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap camat, aparatur kecamatan, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap mekanisme pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Manonjaya telah berupaya menerapkan *Good Governance*, meskipun masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip transparansi terlihat dari upaya penyediaan informasi melalui laporan keuangan dan kebijakan, namun terhambat oleh keterbatasan sarana fisik dan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat komputer usang, dan ketiadaan *website* resmi yang aktif. Masyarakat juga kesulitan mengakses informasi karena minimnya sosialisasi dan penggunaan bahasa birokrasi yang kurang dipahami. Prinsip akuntabilitas tercermin dari laporan kinerja triwulanan, tetapi sifatnya masih formalistik dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hanya 25% staf yang terlatih dalam menyusun laporan akuntabel, dan mekanisme pengaduan seperti kotak aduan tidak ditindaklanjuti secara transparan. Prinsip partisipasi masyarakat belum optimal karena rendahnya literasi masyarakat tentang hak berpartisipasi dan dominasi elit lokal dalam forum musrenbang. Sosialisasi forum partisipasi hanya menjangkau 40% warga, dan kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan SDM, anggaran, infrastruktur teknologi, budaya birokrasi yang hierarkis, serta mekanisme partisipasi yang tidak inklusif. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, reformasi mekanisme partisipasi, optimalisasi anggaran, dan penguatan infrastruktur untuk mendukung penerapan *Good Governance* secara lebih efektif.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pelayanan Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat